

## Pengolahan Sampah dengan Teknologi di DIY Direncanakan dengan RDF

YOGYAKARTA (IM)- Pemerintah Daerah (Pemda) DIY berencana untuk membeli teknologi pengolahan sampah yang pengadaannya dilakukan pada 2024 mendatang. Alat yang nantinya digunakan untuk mengolah sampah ini direncanakan dengan cara dikeringkan.

Meski begitu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kuncoro Cahyo Aji mengatakan bahwa untuk pengadaan teknologinya sendiri masih harus dibahas lebih lanjut. "Di 2024 itu mencoba untuk (pengolahan sampah) digagas dengan teknologi, itu rencananya pakai (cara) RDF (refuse-derived fuel), pengeringan. Jadi itu seperti incinerator itu loh," kata Kuncoro, Selasa (22/8).

Kuncoro menjelaskan, teknologi tersebut merupakan teknologi pengolahan sampah yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Meski begitu, sebelum menggunakan teknologi ini harus ada analisis dampak lingkungan (amdal) yang disiapkan.

"Alat itu memang kami cari dari katalog dan yang sudah direkomendasi oleh KLHK, rencananya begitu. Hanya, kemudian yang perlu diperhatikan adalah itu kegiatan baru, sehingga harus ada amdalnya,"

ucap Kuncoro. Kuncoro menyebut bahwa saat ini pihaknya bersama dengan OPD lainnya masih memproses terkait amdal tersebut. "Selesai amdalnya ya nanti tergantung kesiapan, tahapan-tahapannya dipenuhi," katanya. Pemda DIY sudah menyebut bahwa pengadaan alat tersebut dilakukan dengan mengajukan pinjaman daerah ke BPD DIY sebesar Rp 100 miliar. Pinjaman tersebut ditargetkan dalam jangka lima tahun, meski saat ini rencana pinjaman tersebut masih dikaji.

Sebelumnya, Dosen Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Wiratni juga menanggapi terkait pembelian alat tersebut. Ia menilai bahwa teknologi yang berhasil dipakai di negara lain belum tentu berhasil digunakan di Yogyakarta.

"Kalau boleh berpesen untuk Pemerintah Daerah Yogyakarta, intinya teknologi yang berhasil di tempat lain itu belum tentu itu the best juga untuk di Yogyakarta, karena dilihat karakteristik sampahnya, misalnya teknologi yang terbukti di Singapura berhasil Singapura jadi bersih itu. Apa ya kalau teknologi itu kita beli kita pasang di jogja terus kita otomasi seindah Singapura? Sebersih Singapura? Itu belum tentu," kata Wiratni dalam kegiatan Pojok Bulaksumur, di UGM, Senin (21/8). ● yaa

## PJ Gubernur Banten Sebut Hujan Buatan Jadi Solusi Polusi Udara di Tangerang

TANGERANG (IM)- Penjabat (PJ) Gubernur Banten, Al Muktabar menyebut hujan buatan menjadi salah satu langkah penanganan polusi udara yang saat ini melanda sejumlah wilayah, khususnya Tangerang.

Menindaklanjuti usulan tersebut, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah mengajukan permohonan terhadap Pemerintah Pusat. "Kita sudah sampaikan kepada pemerintah pusat untuk dilakukan hujan buatan di beberapa wilayah Provinsi Banten kaitan polusi udara dan kemarau," ujarnya saat menghadiri upacara Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Ke-78 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Selasa (22/8).

Lebih lanjut, saat ini pihaknya masih menunggu konfirmasi terkait realisasi hujan

buatan dari pemerintah pusat. Sebab, survei lokasi dan modifikasi cuaca merupakan wewenang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). "Karena hujan buatan itu faktor alam maka BMKG yang melakukan survei-survei di permukaan dan uap air. Bila itu memungkinkan akan dilakukan langkah-langkah sesuai prosedur yang ada," katanya.

Meski begitu, Al Muktabar memastikan pihak Pemprov Banten siap memberi bantuan apabila usulan hujan buatan tersebut benar-benar direalisasikan. Menurutnya, Pemprov Banten memiliki anggaran yang dapat digunakan untuk kegiatan terduga, dalam hal ini ialah penanganan polusi udara. "Kita punya pembiayaan BTT (Belanja Tak Terduga) namanya, untuk kita bisa berkontribusi kepada hal-hal yang bersifat darurat," ujarnya. ● pp



IDN/ANTARA

## PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH DI PERBATASAN RI - PALAU

Pelajar mengibarkan dan membentangkan bendera Merah Putih di pulau terluar Pantai Kepulauan Fani Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin (21/8). Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengajak warga untuk turut menjaga kedaulatan dan mencintai NKRI di wilayah perbatasan tapal batas NKRI dengan negara Palau.

## Banten akan Terapkan WFH untuk ASN, Pengamat: Tak Efektif Atasi Polusi Udara

Penyumbang polusi udara di Banten dan DKI Jakarta adalah dari transportasi atau kendaraan bermotor, kemudian industri, dan pembakaran sampah. Kemacetan kendaraan di daerah tertentu, membuat ada konsentrasi emisi yang kemudian menjadi polusi. Nah, yang harus dilakukan kebijakan bagaimana kemacetan bisa direduksi, ujar Direktur Eksekutif Rekonvasi Bhumi, Nana Prayatna Rahadian.

SERANG (IM)- Pemerintah Provinsi Banten dalam waktu dekat akan memberlakukan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi sebagian aparat sipil negara (ASN).

Kebijakan ini dilakukan untuk menurunkan tingkat polusi udara di Banten. Lantas, efektifkah kebijakan tersebut? Direktur eksekutif Rekonvasi Bhumi, Nana Prayatna Rahadian menilai, kebijakan

WFH di lingkungan Pemprov Banten dan Tangerang Raya tidak akan efektif untuk mengurangi pencemaran udara.

"Kurang efektif kebijakan WFH, kurang masuk akal. Harusnya yang harus diatasi penyebabnya seperti kemacetan, industri dan batu bara PLTU," kata Nana saat dihubungi, Selasa (22/8).

Menurutnya, penyumbang polusi udara di Banten dan DKI Jakarta adalah dari transportasi atau kendaraan bermotor, kemudian industri, dan pembakaran sampah. "Kemacetan kendaraan di daerah tertentu sehingga ada konsentrasi emisi yang kemudian menjadi polusi. Nah, yang harus dilakukan kebijakan bagaimana kemacetan bisa direduksi," ujar Nana.

Nana pun mendorong Pemerintah membuat kebi-

ijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, dan beralih ke moda transportasi umum. Selain itu, Pemerintah harus mengawasi baku mutu dan pengelolaan lingkungan di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang disebut menjadi penyebab polusi. KLHK menyatakan bahwa asap dan uap dari cerobong PLTU batu bara di Banten menjadi penghasil gas emisi karbon.

"PLTU itu sudah mempunyai baku mutu, kemudian kalau PLTU menjadi sumber pencemaran, berarti pengelolaan lingkungan tidak beres. Kan ada ambang batas baku mutu, ketika yang tidak boleh dilampau itu pelanggaran hukum," kata Nana.

Nana pun mendukung solusi jangka panjang Pemprov Banten yang akan memperbanyak penghijauan lingkun-

gan dengan menanam pohon. Sebab, untuk jangka pendek penanaman pohon tidak akan berpengaruh pada perbaikan kualitas udara. "Untuk masa depan bagus, tapi kan nggak bisa pohon yang baru ditanam langsung mereduksi karbon. Tapi itu kebijakan bagus kalau serius," tandas dia.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, dalam waktu dekat akan membuat kebijakan WFH untuk aparat sipil negara di lingkungan Pemprov Banten. Langkah itu dilakukan setelah adanya instruksi dari Pemerintah pusat untuk mengatasi polusi udara. Setelah Pemprov Banten membuat surat edaran, WFH juga diharapkan akan diikuti oleh wilayah di Tangerang Raya yakni Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangsel. ● pra

## Bantu Nelayan di Pandeglang, Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Pengolahan Ikan

PANDEGLANG (IM)- Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Nelayan Pesisir Banten menggelar praktik pengolahan ikan di Kampung Lelang Baru, Desa Panimbang, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Selain itu, mereka memberikan bantuan kepada warga serta nelayan.

Koordinator Wilayah Komunitas Nelayan Pesisir Banten, Rizal Al-Ayubi mengatakan, praktik pengolahan ikan dan bantuan yang diberikan ini bertujuan untuk membantu para nelayan di Kampung Lelang Baru.

"Bantuan sosial yang kami berikan berupa jaring, tali, dan alat penerangan yang memang dibutuhkan para nelayan. Kemudian juga pelatihan membuat ikan asin untuk memanfaatkan hasil nelayan," tutur Rizal dalam keterangannya, Selasa (22/8).

Rizal mengaku, kehadiran relawan Ganjar kali ini disambut baik dan mendapat antusias dari warga nelayan di lokasi.

"Peserta yang hadir dari masyarakat, ada yang tergabung juga di paguyuban nelayan. Sangat terlihat juga antusias dan gembira," ujarnya.

Selain menggelar praktik pengolahan ikan dan memberi bantuan, Rizal menambahkan, terdapat juga diskusi bersama para warga dan nelayan tentang sosok bacapres Ganjar Pranowo. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok yang diharapkan dapat membuat perubahan dan berpihak kepada nelayan.

"Nelayan di sini ada banyak keluhan. Mereka berharap Pak Ganjar bisa menyahterakan nelayan ketika jadi Presiden nanti. Apalagi diketahui Pak Ganjar sangat masif menyahterakan nelayan di Jateng lewat berbagai

programnya," tuturnya. Sementara itu, salah satu nelayan sekaligus warga Kampung Lelang Baru, Mulyono mengucapkan terima kasih atas kehadiran relawan Ganjar.

Menurutnya, kehadiran relawan Ganjar kali ini memberikan manfaat karena selain ada bantuan terdapat juga diskusi tentang kebutuhan para nelayan.

"Alhamdulillah bantuan sudah diterima nelayan dan ada juga pembikinan ikan asin. Terima kasih banyak untuk relawan Pak Ganjar," kata Mulyono.

Dia pun berharap, Indonesia ke depan dapat dipimpin oleh Ganjar yang memiliki kinerja baik.

"Saya tahu sosok Pak Ganjar itu bisa dibalang baik. Inshaallah saya dukung Pak Ganjar menjadi Presiden 2024, untuk Indonesia lebih maju dan baik," tuturnya. ● pra



IDN/ANTARA

## BURSA KERJA DI SIDOARJO

Pencari kerja melakukan wawancara dengan salah satu pegawai perusahaan pada Jobfair Hybrid Sidoarjo 2023 di Mal Pelayanan Publik, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (22/8). Pemerintah daerah setempat menggelar bursa kerja yang diikuti 41 perusahaan dengan membuka 1.000 lowongan pekerjaan.

## Petani Lebak Mulai Maksimalkan Tanam Sayuran

LEBAK (IM)- Sejumlah petani di Kabupaten Lebak, Banten, kini mulai beralih menanam sayuran karena lahan garapan pertanian mereka mengalami kekeringan.

"Kami menanam ketimun karena tidak membutuhkan banyak air. Kami hanya menyiram pagi dan sore," kata Samin (55) seorang petani di Blok Kanaga Kecamatan Wanggunung Kabupaten Lebak, Selasa (22/8).

Menurut dia, menanam ketimun dinilai lebih menguntungkan, karena waktu panen hanya 40 hari setelah tanam. Selanjutnya, panen ketimun itu bisa berlangsung selama dua pekan ke depan.

Ia mengatakan, penanaman ketimun tidak terdampak kemarau dan permintaan pasar cenderung meningkat. Selain itu harga di pasaran relatif baik, bahkan di tingkat petani bisa Rp6.000/kilogram.

"Kami tanam ketimun itu jika musim kemarau karena sawah di sini masuk kategori tadah hujan," kata Samin menambahkan.

Menurut dia, pihaknya menanam ketimun itu berdasarkan pengalaman tahun lalu dari luas lahan dua petak sawah atau 1.000 meter persegi dan mampu memproduksi dua ton.

Dari hasil sebanyak dua ton itu dijual Rp6.000/kilogram, sehingga diakumulasikan dapat menghasilkan uang Rp12 juta. "Kita bisa meraup keuntungan sekitar Rp7 juta bersih setelah dipotong biaya produksi," ujar Samin.

Begitu juga petani lain di Desa Bojongleles Kabupaten Lebak Samsudin. Pria 60 tahun itu mengatakan pihaknya kini mengembangkan sayuran dengan meman-

faatkan lahan persawahan yang tidak ditanami padi akibat kekeringan.

Tanaman sayuran yang dibudidayakan itu jenis paku, kacang panjang dan ketimun. Menurut dia, ia menanam sayuran tiga petak sawah dengan harga di tingkat petani rata-rata Rp6.000/kilogram. Produksi tanaman sayuran jika panen sebanyak tiga ton maka pendapatan petani sebesar Rp18 juta.

"Kami setiap musim kemarau menanam sayuran dan jika musim hujan baru tanam padi," ujarnya menjelaskan.

Begitu juga petani Cipanas Kabupaten Lebak Suhari (55) mengatakan sebagian besar petani pada musim kemarau tidak menanam padi karena mengalami kekeringan. Bahkan, saat ini areal persawahan terjadi kekeringan hingga terlihat petak-petak sawah tanahnya terbelah.

"Petani di sini lebih memilih tanam ketimun dan kacang panjang karena sudah ditampung oleh tengkulak. Kami sekali musim panen bisa mendapatkan sekitar Rp15 juta dari tiga petak itu," kata Suhari.

Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Deni Iskandar mengimbau petani agar mengembangkan pertanian sayur-sayuran sehubungan musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September.

"Kita minta petani bisa mengganti pola tanam dari dua kali padi sawah dan satu kali tanaman sayuran dalam setahun. Sebab, pergantian tanaman itu dapat meningkatkan produksi pangan dan ekonomi petani menjadi lebih baik," katanya menjelaskan. ● pra



IDN/ANTARA

## LOMBA LAYANG-LAYANG TRADISIONAL

Peserta mengikuti lomba layang-layang tradisional di Desa Tersana, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (22/8). Lomba yang diikuti puluhan peserta itu digelar untuk melestarikan permainan layang-layang tradisional yang keberadaannya mulai langka.

## Bupati Irna Ajak Kader Posyandu Edukasi Calon Pengantin

PANDEGLANG (IM)- Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengajak ratusan kader posyandu gencar mengedukasi penanganan stunting kepada ibu hamil dan ibu memiliki anak balita. Ajakan itu disampaikan Bupati Irna, pada saat menghadiri kegiatan workshop peningkatan kapasitas kader di gedung PGRI Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang.

Menurut Bupati Irna, mengedukasi tentang penanganan stunting itu penting. "Khususnya kepada ibu hamil dan ibu memiliki anak balita maupun kepada para calon pengantin. Untuk itu diminta kepada kader posyandu gencar mengedukasi tentang penanganan stunting," katanya di Gedung PGRI Kecamatan Sukaresmi, Senin kemarin.

Bupati Irna berharap, kepada para kader posyandu harus proaktif dalam menyosialisasikan masalah stunting kepada masyarakat. Dengan aktif memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai stunting dan pencegahannya maka masalah kesehatan stunting dapat dicegah sejak dini.

Stunting menjadi perhatian pemerintah saat ini. Penanganannya membutuhkan peran serta semua pihak dalam menekan angka stunting di Kabupaten Pandeglang. "Untuk itu dibutuhkan

dukungan dan kerjasama semua komponen masyarakat. Khususnya para kader posyandu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," katanya.

Bupati Irna mengungkapkan, Pemkab Pandeglang telah berhasil menurunkan angka stunting. Dari sebelumnya 37,8 persen menjadi 29,4 persen.

"Penurunan itu hasil dari keputusan embuk stunting. Pemkab Pandeglang menargetkan penurunan angka stunting menjadi 24 persen pada tahun 2024," katanya.

Dalam upaya menurunkan angka stunting ini perlu komitmen dan peran serta seluruh lapisan masyarakat. "Terutama peran para kader posyandu agar terus gencar melakukan edukasi dan sosialisasi stunting kepada masyarakat," katanya.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Jaenal Mutaqin mengatakan, dalam upaya menekan angka stunting agar mencapai target 24 persen di tahun 2024, Dinas Kesehatan menggelar workshop peningkatan kapasitas kader posyandu.

"Melalui workshop ini untuk meningkatkan kapasitas kader posyandu. Agar mampu meningkatkan kompetensi dan sumber daya manusia (SDM) para kader posyandu dalam rangka menurunkan angka stunting di Kabupaten Pandeglang," katanya. ● pra